

JK3L

**Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja
dan Lingkungan (JK3L)**

Volume 02 No.1 Tahun 2021

<http://jk3l.fkm.unand.ac.id/> | ISSN 2776-4113



**GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KEBIJAKAN
WARGA ZONA MERAH KOTA PADANG TERHADAP
ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI**

Fitriyani^{1*}, Kurnia Saputri¹, Novia Wirna Putri¹

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, 25163

Corresponding Author : fitriyani@ph.unand.ac.id

Artikel diterima : 21 April 2021 | Disetujui : 10 Mei 2021 | Publikasi : 10 Mei 2021

ABSTRAK

Kota Padang merupakan salah satu daerah pada pesisir pantai Sumatera Barat yang memiliki risiko tinggi terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik wilayah yang berada pada pesisir pantai yang memiliki zona tumbukan aktif lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, dekat dengan zona patahan Mentawai dan sesar semangko. Namun, kondisi dalam menghadapi ancaman gempa saat ini, terutama pada zona merah Kota Padang, belum memadai bahkan pusat ekonomi, perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan serta 65% penduduk juga bermukim pada zona ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana warga Kota Padang terutama pada zona merah dalam menghadapi ancaman gempa bumi dilihat dari variabel pengetahuan, sikap, dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang (*cross sectional study*). Penelitian dilakukan di wilayah zona merah Kota Padang yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, dan Kecamatan Nanggalo pada bulan Februari sampai dengan Juli tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi *google form*. Jumlah populasi penelitian ini adalah 179.214 orang. Jumlah sample yang dibutuhkan adalah 106 orang. Hasil penelitian menunjukkan 33% responden memiliki pengetahuan yang rendah terkait ancaman gempa bumi, 42,5% responden bersikap negatif, dan 45,3% kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh warga zona merah kota Padang tergolong kebijakan kurang baik. Diharapkan masyarakat agar dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, seperti yang diadakan oleh Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Kata kunci: Zona Merah Gempa, Kesiapsiagaan Gempa, Gempa Kota Padang, Ancaman Gempa Bumi

PENDAHULUAN

Bencana dapat diartikan sebagai segala peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.^[1] Risiko yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi diantaranya adalah kerusakan pada benda seperti bangunan, jalan, dan infrastruktur lain dimana kerusakannya dapat berdampak pula kepada manusia yang mendiaminya. Risiko paling ringan yang dialami adalah adanya rasa trauma (psikologis) akibat guncangan dari kejadian gempa bumi hingga risiko terluka, cacat, dan bahkan kematian akibat terhimpit, tertimbun, tertimpa benda yang mengalami ketidakstabilan.^[2]

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Menurut data BNPB, hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, yaitu lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat.^[3] Berdasarkan data BMKG, dari tanggal 1 sampai dengan 17 September 2020 tercatat sudah terjadi lebih 20 kali aktifitas gempa di Indonesia yang mampu dirasakan hingga ke daratan tempat tinggal penduduk dan berpotensi merusak, yaitu kekuatan gempa mencapai diatas 5.0 Magnitude dimana beberapa diantaranya juga berpotensi tsunami.^[4]

Kejadian gempa bumi yang terjadi di Indonesia yang bersifat signifikan dan sampai merusak selama tahun 2018 terjadi sebanyak 23 kasus, jumlah kasus ini meningkat jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2017, yaitu sebanyak 20 kasus. Kasus pertama kejadian gempa bumi 2018 terjadi di Lebak Banten pada tanggal 23 Januari 2018, dengan kekuatan gempa mencapai 6.4 M. Gempa dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, dan Lampung. Dampak yang ditimbulkan tercatat 6 orang luka berat dan 2 orang luka ringan, 1.479 rumah rusak ringan, 498 rusak sedang, dan 187 unit rusak berat. Kerusakan lainnya juga berdampak pada sarana dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, puskesmas, dan lainnya. Berikutnya kejadian gempa bumi di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018, dimana saat itu kejadian gempa bumi juga diikuti dengan gelombang tsunami. Gempa bumi ini disebabkan oleh aktifitas Gunung Anak Krakatau. Dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini adalah 431 orang meninggal dunia, 7200 orang luka sedang hingga berat, 15 orang hilang, dan sekitar 46.646 orang mengungsi.^[5]

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Hal ini karena secara geologis Provinsi Sumatera Barat berada pada dataran rendah, yaitu mulai dari pantai barat Samudera hindia hingga dataran tinggi, yaitu dikelilingi oleh berbagai gunung dengan aktivitas vulkanik aktif, diantaranya yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Gunung Sago, dan lainnya. Selain itu, juga dilalui oleh Bukit Barisan yang membentang dari laut ke tenggara. Sumatera Barat juga terletak pada jalur patahan semangko, tepat diantara pertemuan dua lempeng benua besar yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang mengakibatkan rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.^[6]

Provinsi Sumatera Barat juga cukup sering diguncang oleh gempa bumi bersifat signifikan dan merusak yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2007 yang menimbulkan kerusakan pada 219 unit rumah ibadah, 410 unit sekolah, 111 unit perkantoran, dan 67 orang korban jiwa. Selain itu pada tanggal 30 September 2009 Sumatera Barat kembali diguncang gempa besar yang memporak-porandakan Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan hingga Pasaman Barat. Gempa ini berkekuatan 7,9 SR yang mengakibatkan 1.117 orang meninggal dunia, 788 orang luka berat, 2.727 orang luka ringan, dan 2.845 orang mengungsi, serta mengakibatkan kerusakan pada gedung pemerintahan swasta maupun rumah penduduk. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2010 Provinsi Sumatera Barat kembali terdampak gempa bumi dan diikuti oleh gelombang tsunami, tepatnya di daerah kepulauan Mentawai. Dampak yang ditimbulkan diantaranya korban meninggal dunia 357 orang, hilang 312 orang, ratusan lainnya luka ringan hingga berat, dan ratusan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan sarana prasarana lainnya [6] [7] [8]

Kota Padang merupakan salah satu daerah pada pesisir pantai Sumatera Barat yang memiliki risiko tinggi terkena bencana alam. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik wilayah yang berada pada pesisir pantai yang memiliki zona tumbukan aktif lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, dekat dengan zona patahan Mentawai dan sesar semangko. Hal inilah yang menyebabkan Kota Padang menjadi salah satu daerah rawan terhadap bencana terutama gempa bumi dan tsunami dimana Kota Padang hampir setiap tahunnya merasakan aktifitas gempa mulai dari skala ringan hingga berat. Salah satu kejadian gempa bumi terbesar di Kota Padang terjadi pada 30 September 2009. Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi tersebut tercatat sebanyak 1.587 orang. Ada 383 orang meninggal dunia, 431 orang luka berat, 771 orang luka ringan, dan 2

orang hilang. Selain itu juga mengakibatkan banyaknya kerusakan fisik, seperti rumah, tempat ibadah, gedung perkantoran, sekolah, sarana kesehatan, dan lainnya. [9] [10]

Akibat Kota Padang yang terletak berbatasan dengan pesisir pantai dan rawan aktifitas gempa bumi sehingga terdapat beberapa bagian daerah di Kota Padang termasuk kategori zona merah. Namun, kondisi saat ini belum tersedianya tempat-tempat dan jalur evakuasi yang memadai pada kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai wilayah zona merah. Selain itu, diperparah dengan sebagian besar penduduk bermukim pada zona ini, yaitu sebanyak 65%, serta menurut kepala pelaksana BPBD Kota Padang Zona ini juga merupakan sebagai pusat ekonomi, dagang, pusat pemerintahan, dan pusat pendidikan. [9]

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006), ada lima parameter indikator untuk menilai kesiapsiagaan masyarakat, yaitu pengetahuan dan sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, system peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya. Untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi ini seperti korban jiwa, kerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya, maka masyarakat perlu memiliki minimal tingkat pengetahuan, sikap, dan kebijakannya yang baik dalam menghadapi bencana gempa bumi. Paratemer pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana merupakan faktor utama dari kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap siaga dalam menghadapi bencana, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang rentan terhadap bencana alam. Seseorang yang mempunyai pengetahuan lebih tinggi diharapkan lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sebab pengetahuan merupakan dasar dari kesadaran untuk melakukan perencanaan kedaruratan, mobilisasi sumber daya dan peringatan dini. Pengetahuan juga menjadi dasar untuk melakukan aktivitas yang benar

dalam mengantisipasi datangnya bencana. Sikap adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesiapsiagaan seseorang dalam menghadapi bencana, karena sikap merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan respon terkait tindakan yang akan dilakukan jika terjadi suatu bencana. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, pengetahuan tentang kebencanaan dan sikap yang ditanamkan dimaksudkan untuk membangun kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana secara cepat dan tepat. Parameter selanjutnya adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Kebijakan kesiapsiagaan bencana alam sangat penting dan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana sehingga dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat dikurangi. Kebijakan yang signifikan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan meliputi: pendidikan publik, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya termasuk pendanaan, SDM, organisasi pengelola, dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk, tetapi akan lebih bermakna apabila dicantumkan secara konkrit dalam peraturan-peraturan, seperti: SK atau Perda. [11] [12] [13] [14] [15]

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang (*cross sectional study*). Gambaran variabel pengetahuan, sikap, dan kebijakan dalam penelitian *cross sectional* diukur atau dikumpulkan secara simultan (dalam waktu yang bersamaan). Penelitian ini dilakukan di wilayah zona merah Kota Padang yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, dan Kecamatan Nanggalo pada bulan Februari sampai dengan Juli tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi *google form*. Jumlah populasi penelitian ini adalah 179.214 orang dan jumlah sample adalah 106 orang [16].

Analisa penarikan sample ini dilakukan dengan menggunakan rumus Lameshow, dimana nilai baku distribusi normal adalah 1,96, nilai proporsi kasus tertentu terhadap populasi 50%, dan besar penyimpangan absolut yang diterima adalah 10%. Teknik pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui pengisian kuesioner yang diadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan data yang akan dianalisis serta sudah melalui tahapan uji validitas dan realibilitas. Data sekunder diperoleh dari data Badan Meteorology Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang, dan dari profil Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini ada 3 (tiga) variabel yang diteliti, yaitu pengetahuan, sikap, dan kebijakan untuk menggambarkan bagaimana warga kota Padang terutama pada zona merah dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Pengetahuan yang diteliti merupakan pengetahuan dasar mengenai bencana gempa bumi, seperti dapat mengetahui dan memahami ciri-ciri gempa bumi, penyebab, gejala, dampak gempa bumi, dan sebagainya. Untuk variabel sikap yang diteliti adalah bagaimana kecenderungan masyarakat untuk memberi respon tentang tindakan yang harus dilakukan apabila akan terjadi bencana gempa. Sedangkan untuk variabel kebijakan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan masyarakat untuk siap siaga menghadapi bencana gempa bumi, meliputi: kesepakatan masyarakat mengenai tempat evakuasi dalam kondisi darurat dan kesepakatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam simulasi evakuasi.

Berdasarkan data distribusi karakteristik responden diketahui bahwa responden penelitian ini sebagian besar adalah remaja akhir berumur 17 – 25 tahun. Hal ini diduga karena responden dengan umur ini lebih memiliki banyak waktu dalam menggunakan

gadget dan berselancar di dunia internet sehingga lebih mudah menemukan kueisoner

penelitian ini yang disebar melalui aplikasi *google form*.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakterik Responden	f	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	34	32,1
Perempuan	72	67,9
Usia		
17-25 tahun (Remaja Akhir)	71	67,0
26-35 tahun (Dewasa Awal)	10	9,4
36-45 tahun (Dewasa Akhir)	5	4,7
46-55 tahun (Lansia Awal)	14	13,2
56-65 tahun (Lansia Akhir)	5	4,7
66 tahun ke atas (Manula)	1	0,9
Kecamatan Tempat Tinggal		
Padang Barat	31	29,2
Padang Utara	28	26,4
Nanggalo	47	44,3
Pendidikan Terakhir		
SD	2	1,9
SMP	8	7,5
SMA	51	48,1
D3/S1 ke atas	45	42,5

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan, Sikap, dan Kebijakan

Variabel	f	%
Pengetahuan		
Rendah	35	33
Tinggi	71	67
Sikap		
Negatif	45	42,5
Positif	61	57,5
Kebijakan		
Kurang baik	48	45,3
Baik	58	54,7
Total	106	100

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan faktor utama dari kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap siaga dalam menghadapi bencana, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang

rentan terhadap bencana alam. Seseorang yang mempunyai pengetahuan lebih tinggi diharapkan lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sebab pengetahuan merupakan dasar dari kesadaran untuk melakukan perencanaan kedaruratan,

mobilisasi sumber daya dan peringatan dini.
[11]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa lebih dari separuh responden (67%) memiliki pengetahuan yang tinggi dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, hal ini diduga terjadi karena responden dalam penelitian merupakan masyarakat perkotaan sehingga cenderung untuk mendapatkan pendidikan dengan akses yang mudah dan fasilitas yang lebih lengkap. Untuk itu, diperlukan pemerataan akses, pelatihan, dan fasilitas terkait penanggulangan kegempaan.

Dari 106 responden diketahui bahwa pengetahuan terkait bencana gempa bumi yang paling rendah adalah mengenai bagaimana tindakan penyelamatan diri yang tepat yang perlu dilakukan saat terjadi bencana gempa bumi, yaitu hanya 30,2% responden yang memberikan jawaban yang benar. Data ini dapat dilihat pada tabel 3. Selanjutnya, pengetahuan responden paling bawah kedua adalah terkait pengetahuan peristiwa gempa bumi yang merupakan bencana sosial, yaitu hanya 49,1% responden yang menjawab benar, sisanya responden beranggapan peristiwa gempa bumi bukanlah bencana sosial. Sedangkan pengetahuan responden paling tinggi berada pada pertanyaan terkait pengertian bencana alam, yaitu kejadian alam yang dapat menyebabkan kerusakan alam, dimana 99,1% responden menjawab dengan benar.

Pada dasarnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan beberapa tindakan dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait bencana kegempaan ini, diantaranya telah diupayakan adanya Satuan Pendidik Aman Bencana (SPAB) melalui bimtek SPAB pada tanggal 19-21 Maret 2019 di Hotel Daima yang dihadiri oleh guru dan kepala sekolah tingkat SLTA di Sumatera Barat. Guru yang hadir diharapkan bisa

menjadi fasilitator di sekolahnya dan membentuk Kelompok Siaga Bencana Sekolah.^[17] Selain itu, Pemerintah Kota Padang melalui BPBD Kota Padang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pedagang, satuan pengamanan pasar raya dan juga pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Padang dalam rangka mencanangkan Program Pasar Cerdas Bencana. Program ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu 28-30 November 2019 di Hotel Axana untuk hari pertama Pasar Raya Padang, hari kedua Pasar Gaung serta Pasar Lubuk Buaya untuk hari ketiga dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Hal ini bertujuan untuk masyarakat terutama pedagang dan satuan pengamanan pasar akan cerdas menyikapi bencana sehingga tidak lagi panic saat bencana terjadi.^[18]

Untuk kembali meningkatkan pengetahuan warga ini, perlu kerjasama antara warga dan juga pemerintah setempat. Dari pihak pemerintah perlu disusun rencana dan kegiatan yang difokuskan pada pengembangan rencana untuk menanggapi bencana secara cepat dan efektif dengan menyiapkan sumber daya, pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat, menyusun pedoman/prosedur tetap, dan menyusun rencana kontigensi. Selain itu, pemerintah perlu memberikan edukasi kembali/sosialisasi mengenai kebencanaan terutama gempa bumi kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerjasama dengan lintas sentor terkait seperti sekolah, kelompok pemuda, petugas BPBD dan lain sebagainya. Misalnya di sekolah/ perguruan tinggi, upaya untuk meningkatkan pengetahuan siswa/mahasiswa tentang kebencanaan dapat dilakukan melalui kurikulum muatan lokal Siaga Bencana atau Manajemen Bencana.

Masyarakat sebaiknya dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, seperti yang diadakan oleh Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang ada di daerah setempat. Hal ini bertujuan agar

menambah pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan dan dapat mempersiapkan diri beserta keluarga lebih baik lagi dalam menghadapi bencana gempa bumi. Masyarakat juga dapat menambah pengetahuannya tentang

kebencanaan dengan mencari informasi tersebut di media cetak maupun media elektronik.

Tabel 3. Uraian Distribusi Frekuensi Pengetahuan

Pengetahuan	Benar		Salah	
	f	%	f	%
Bencana alam adalah kejadian alam yang dapat menyebabkan kerusakan alam	105	99,1	1	0,9
Salah satu penyebab gempa bumi terjadi yaitu akibat pergeseran lempengan bumi	104	98,1	2	1,9
Peristiwa gempa bumi merupakan bencana sosial	52	49,1	54	50,9
Ciri-ciri bencana gempa bumi adalah getaran yang membuat bangunan retak	106	100	-	-
Gempa bumi hanya berdampak terhadap lingkungan	72	67,9	34	32,1
Kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan pada saat terjadi bencana	74	69,8	32	30,2
Tindakan penyelamatan diri yang tepat	32	30,2	74	69,8
Peralatan pertolongan pertama berupa kotak P3K dan obat-obatan ringan	99	93,4	7	6,6
Menyimpan nomor telepon penting yang dapat dihubungi saat kondisi darurat	100	94,3	6	5,7
Mengikuti pelatihan mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana	103	97,2	3	2,8

Sikap

Sikap adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesiapsiagaan seseorang dalam menghadapi bencana, karena sikap merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan respon terkait tindakan yang akan dilakukan jika terjadi suatu bencana. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana pengetahuan tentang kebencanaan dan sikap yang ditanamkan dimaksudkan untuk membangun kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana secara cepat dan tepat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sikap positif yang banyak di miliki oleh responden adalah terkait tindakan akan menuju tempat terbuka dan tidak berdiri di bawah

pohon, tiang listrik, dan bangunan saat terjadi gempa bumi. Namun, diketahui juga bahwa masih banyak responden memiliki sikap negative terutama terkait kesiapan dalam menyediakan kotak P3K, obat-obatan penting dan penerangan alternatif (senter, lampu, baterai cadangan) apabila terjadi gempa. Serta sikap negatif responden dengan lebih mementingkan menyelamatkan diri sendiri ketimbang membantu mengevakuasi orang disekitarnya saat terjadi gempa bumi, dan responden merasa panik saat bencana gempa bumi terjadi.

Sebaiknya masyarakat menyediakan kotak P3K, obat-obatan penting dan penerangan alternatif (senter, lampu, baterai cadangan) sebelum terjadinya bencana,

membantu orang disekitar seperti anggota keluarga saat proses evakuasi, dan tidak terlalu merasa panik saat bencana gempa bumi terjadi. Saat terjadi gempa bumi jangan terlalu panik dan jika berada di dalam rumah bisa berlindung dibawah meja, tetapi juga bisa berlari ke luar rumah menuju lapangan terbuka (jauh dari tiang, sumber listrik, pohon, dan bangunan yang mudah roboh) dengan tetap melindungi kepala. Selain itu, sebaiknya ada anggota keluarga yang mengikuti pelatihan pertolongan pertama. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana.

Dari sikap yang ditunjukkan oleh responden dalam menghadapi ancaman gempa bumi diketahui bahwa sikap positif yang banyak di miliki oleh responden adalah terkait tindakan akan menuju tempat terbuka dan tidak berdiri di bawah pohon, tiang listrik, dan bangunan saat terjadi gempa bumi. Sedangkan sikap negatif yang dimiliki responden adalah terkait menyiapkan kotak P3K, obat, dan penerangan alternatif sebelum menghadapi gempa bumi serta sebagian besar responden memiliki sikap lebih mementingkan menyelamatkan diri sendiri dan juga adanya perasaan panik saat terjadi gempa.

Tabel 4. Uraian Distribusi Frekuensi Sikap

Sikap	STS		TS		KS		S		SS		Jumlah
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Malewati jalur evakuasi dan tangga darurat	1	0,9	5	4,7	8	7,5	40	37,7	52	49,1	455
Menuju tempat terbuka	-	-	1	0,9	1	0,9	27	25,5	77	72,6	498
Menyiapkan kotak P3K, obat, dan penerangan alternatif	2	1,9	4	3,8	6	5,7	37	34,9	57	53,8	175
Melindungi kepala	-	-	1	0,9	10	9,4	32	30,2	63	59,4	475
Mengikuti pelatihan	2	1,9	3	2,8	16	15,1	37	34,9	48	45,3	444
Menghubungi nomor darurat	1	0,9	5	4,7	19	17,9	34	32,1	47	44,3	439
Lebih mementingkan barang berharga	34	32,1	31	29,2	19	17,9	11	10,4	11	10,4	395
Lebih mementingkan menyelamatkan diri sendiri	8	7,5	12	11,3	38	35,8	28	26,4	20	18,9	278
Memiliki asuransi	8	7,5	11	10,4	15	14,2	51	48,1	21	19,8	384
Merasa panik	8	7,5	18	17	22	20,8	43	40,6	15	14,2	279

*STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, KS = Kurang Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju

Kebijakan

Kebijakan kesiapsiagaan bencana alam sangat penting dan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana sehingga dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat dikurangi.

Terbentuknya Tim Siaga Bencana atau Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang merupakan tindakan lanjutan dari sebuah upaya kesiapsiagaan, sebagaimana kesiapsiagaan yang dimaksudkan dalam UU No 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah tindakan-

tindakan efektif yang dilakukan sebelum terjadi bencana, termasuk pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi yang dimaksud tidak semata-mata hanya organisasi pemerintah, namun juga organisasi yang ada ditengah masyarakat layaknya pembentukan KSB di Kota Padang sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan kesiapsiagaan kepada masyarakat. Pembentukan KSB yang dilakukan Pemerintah Kota Padang juga sebagai bentuk pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat yang bertujuan membangun kapasitas masyarakat, sebab secara garis besar program peningkatan kesiapsiagaan masyarakat seharusnya lebih ditekankan pada *community development*.^{[19] [20]}

Berdasarkan peran, tugas dan tanggung jawab dari setiap KSB, dapat diambil kesimpulan bahwa KSB tidak hanya dibentuk untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan komunitasnya sendiri, tetapi KSB dapat berperan aktif dalam setiap penanggulangan bencana di Kota Padang. Dimulai dari tim reaksi cepat yang langsung memberikan bantuan kepada warga yang butuh pertolongan tanpa menunggu tim penyelamat dari pihak lain, kemudian mampu mengarahkan dan membantu warga untuk melakukan evakuasi, dan mampu bertugas sebagai tim SAR serta mengakomodasi permasalahan logistik darurat bencana. KSB tidak hanya dibentuk di tingkat kota, tetapi juga dibentuk di tingkat kelurahan dan kecamatan. Anggota KSB sendiri yaitu ketua pemuda, kader, ketua RT/RW, dan masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta keanggotaannya dipilih melalui musyawarah.

Dari penelitian yang dilakukan lebih dari separuh responden (50,9%) tidak mengetahui

adanya Tim/Kelompok Siaga Bencana di daerah setempat. Hal ini disebabkan oleh tidak semua KSB yang ada di Kota Padang ini aktif dalam menjalankan tugas dan perannya dalam pengurangan risiko terhadap bencana serta sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan kebencanaan kepada masyarakat. Sebaiknya KSB yang telah dibentuk lebih aktif dan dapat mengoptimalkan kinerjanya, melakukan berbagai program seperti mensosialisasikan kembali atau menyebarluaskan kembali pengetahuan yang telah didapat dari pelatihan atau seminar yang dilaksanakan oleh BPBD kepada masyarakat setempat dan segera tanggap dalam membantu melakukan evakuasi ketika terjadi bencana. Sebaiknya masyarakat atau setidaknya perwakilan dari keluarga dapat mengikuti sosialisasi dan pelatihan kebencanaan baik yang diadakan di sekolah, perguruan tinggi, maupun di daerah tempat tinggal. Informasi mengenai sosialisasi dan pelatihan ini dapat diakses masyarakat melalui media massa. Sosialisasi dan pelatihan kebencanaan sangat penting dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana, agar kita tahu apa-apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan jika terjadi bencana.

Dari kebijakan yang di sepakati dan dilakukan oleh warga zona merah Kota Padang diketahui bahwa 50,9% responden mengatakan tidak ada tim siaga bencana gempa bumi yang dibentuk oleh masyarakat setempat, 49,1% responden mengatakan tidak ada kesepakatan keluarga untuk mengikuti sosialisasi/seminar/workshop tentang kebencanaan, dan 41,5% responden yang mengatakan tidak ada kesepakatan keluarga untuk melakukan atau berpartisipasi dalam simulasi evakuasi bencana.

Tabel 5. Uraian Distribusi Frekuensi Kebijakan

Kebijakan	Ada		Tidak Ada	
	f	%	f	%
Kesepakatan keluarga mengenai jalur evakuasi	74	69,8	32	30,2
Kesepakatan keluarga mengenai tempat evakuasi	79	74,5	27	25,5
Kesepakatan keluarga mengenai titik berkumpul	83	78,3	23	21,7
Kesepakatan keluarga untuk berpartisipasi dalam simulasi evakuasi	62	58,5	44	41,5
Kesepakatan keluarga untuk mengikuti sosialisasi/ seminar	54	50,9	52	49,1
Kesepakatan keluarga untuk mengikuti pelatihan	66	62,3	40	37,7
Bantuan dari pemerintah	92	86,8	14	13,2
Sosialisasi kebijakan/ program dari pemerintah	74	69,8	32	30,2
Tim siaga bencana gempa bumi	52	49,1	54	50,9
Diskusi keluarga mengenai tindakan penyelamatan diri	78	73,6	28	26,4

KESIMPULAN

Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (67,9%), rentang usia berada pada 17 – 25 tahun (remaja akhir) sebanyak 67%, kecamatan tempat tinggal 44,3% berada di Kecamatan Nanggalo, dan pendidikan terakhir yang telah dijalani sebagian besar responden adalah SMA 48,1%. Sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan terkait ancaman gempa bumi yang tinggi, yaitu 67%. Namun masih terdapat 33% responden yang tinggal di zona merah gempa bumi Kota Padang berpengetahuan rendah. Sikap yang ditunjukkan responden terhadap ancaman gempa bumi cenderung hampir merata antara responden bersikap negatif dengan yang bersikap positif, yaitu 42,5% responden bersikap negative dan 57,5% sisanya bersikap positif. Kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh warga zona merah kota Padang cenderung hampir merata antara kebijakan yang bersifat kurang baik dan yang

bersifat baik, yaitu 45,3% kebijakan kurang baik dan 54,7% kebijakan baik.

Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kebijakan masyarakat zona merah kota Padang terhadap ancaman gempa bumi maka disarankan agar pemerintah setempat perlu menyusun rencana dan kegiatan yang difokuskan pada pengembangan rencana untuk menanggapi bencana secara cepat dan efektif dengan menyiapkan sumber daya, pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemerataan akses, pelatihan, dan fasilitas terkait penanggulangan kegempaan di seluruh wilayah zona merah. Untuk sekolah/perguruan tinggi, upaya untuk meningkatkan pengetahuan siswa / mahasiswa tentang kebencanaan dapat dilakukan melalui kurikulum muatan lokal Siaga Bencana atau Manajemen Bencana. Sedangkan bagi masyarakat setempat sebaiknya dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan

oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, seperti yang diadakan oleh Kelompok Siaga Bencana (KSB), menyediakan kotak P3K, obat-obatan penting dan penerangan alternatif (senter, lampu, baterai cadangan) sebelum

terjadinya bencana. Selain itu, sebaiknya KSB yang telah dibentuk juga lebih aktif dan dapat mengoptimalkan kinerjanya.

Daftar Pustaka

1. "Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana".
2. C. Husna, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan Bencana di Rsudza Banda Aceh," *Idea Nursing Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 2087-2879, 2012.
3. "Badan Nasional Penanggulangan Bencana," [Online]. Available: <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>. [Accessed 17 September 2020].
4. "Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika," [Online]. Available: <https://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg>. [Accessed 17 September 2020].
5. U. Setiyono, I. gunawan and Priyobudi, Katalog Gempa Bumi Signifikan dan Merusak Tahun 1821 - 2018, Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2019.
6. Y. Harli, N. Carlo and Zulherman, "Tingkat Kerentanan Sosial Masyarakat Kota Padang di Wilayah Rawan Tsunami dengan Analisis Sistem Informasi Geografi (SIG)," *Jurnal Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta Padang*, 2015.
7. S. Syafrezani, Tanggap Bencana Alam Gempa Bumi, Jakarta: Angkasa, 2010.
8. Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, Kementerian Kesehatan , 2011.
9. Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Penanggulangan Bencana Kota Padang, Padang: BPBD Kota Padang, 2011.
10. S. Sampaguita, Tanggap Bencana Alam Gempa Bumi, Bandung: Angkasa, 2010.
11. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," 2017.
12. LIPI-UNESCO/ISDR, Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami, Jakarta, 2006.
13. D. Hidayati, Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami, Jakarta: LIPI - UNESCO, 2006.
14. D. Setyowati, Pendidikan Kebencanaan, Semarang: UNNES Press, 2019.
15. S. Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
16. Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2019: BPS Kota Padang, Padang: BPS, 2020.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera, Padang: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2019.

18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, BPBD Kota Padang Meluncurkan Program Pasar Cerdas Bencana, Padang: BPBD Kota Padang , 2019.
19. R. Novert, "Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami," *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara.*, vol. 3, no. 2, pp. 13 - 28, 2015.
20. BPBD Kota Padang, KSB Berperan Kurangi Risiko Bencana, Padang, 2019.